

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Objek Penelitian

Lingkup Objek dalam penelitian yang ditetapkan penulis sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi belanja infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau.

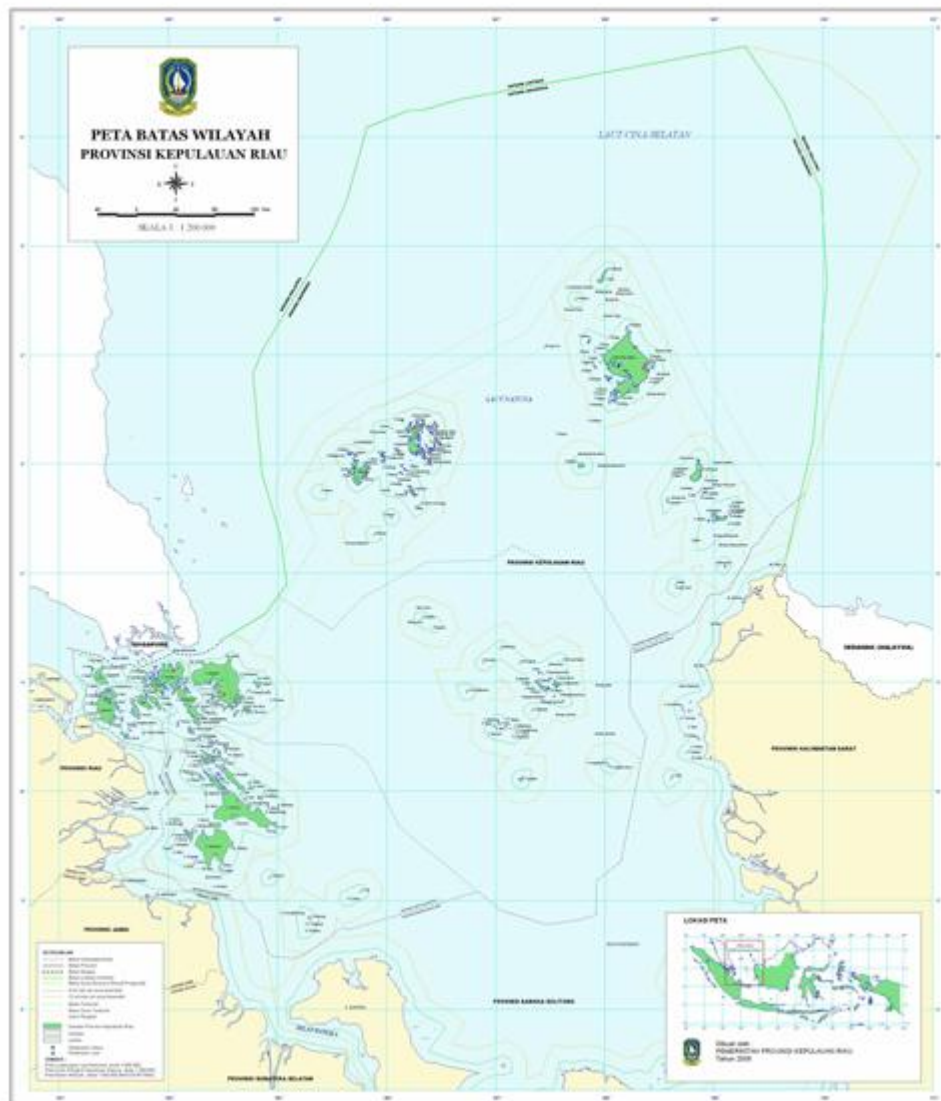
3.1.2 Gambaran Umum Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang penuh dengan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain letak geografisnya yang sangat strategis karena berada pada pintu masuk Selat Malaka dari sebelah Timur juga berbatasan dengan pusat bisnis dan keuangan di Asia Pasifik yakni Singapura. Disamping itu Provinsi ini juga berbatasan langsung dengan Malaysia.

Dengan Motto Berpancang Amanah, Bersauh Marwah, Provinsi Kepulauan Riau bertekad untuk membangun daerahnya menjadi salah satu pusat pertumbuhan perekonomian nasional dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Budaya Melayu yang didukung oleh masyarakat yang sejahtera, cerdas, dan berakhlak mulia.

Dalam memberdayakan berbagai potensi yang ada, Provinsi Kepulauan Riau berusaha untuk tetap menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penerapan good governance dan clean government dengan memberikan kemudahan berinvestasi

sehingga dapat menarik lebih banyak investor baik domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya.



Gambar 3.1 Peta Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Anambas. Secara keseluruhan Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 Kabupaten dan 2 Kota, 42 Kecamatan serta 256 Kelurahan/Desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil dimana 40% belum bernama dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 252.601 Km², di mana 95% - nya merupakan lautan dan hanya 5% merupakan wilayah darat, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Utara dengan Vietnam dan Kamboja
- Selatan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi
- Barat dengan Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau
- Timur dengan Malaysia, Brunei, dan Provinsi Kalimantan Barat

Dengan letak geografis yang strategis (antara Laut Cina Selatan, Selat Malaka dengan Selat Karimata) serta didukung potensi alam yang sangat potensial, Provinsi Kepulauan Riau dimungkinkan untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi bagi Republik Indonesia dimasa depan. Apalagi saat ini pada beberapa daerah di Kepulauan Riau (Batam, Bintan, dan Karimun) tengah diupayakan sebagai pilot project pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui kerjasama dengan Pemerintah Singapura.

Penerapan kebijakan KEK di Batam-Bintan-Karimun, merupakan bentuk kerjasama yang erat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan partisipasi dunia usaha. KEK ini nantinya merupakan simpul-simpul dari pusat kegiatan ekonomi unggulan, yang didukung baik fasilitas pelayanan prima maupun kapasitas prasarana yang berdaya saing internasional. Setiap pelaku usaha yang berlokasi di dalamnya, akan memperoleh pelayanan dan fasilitas yang mutunya dapat bersaing dengan praktik-praktik terbaik dari kawasan sejenis di Asia-Pasifik.

3.1.3 Letak Geografis Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

A. Kota Batam

Luas wilayah Kota Batam seluas 426,463.28 Ha, terdiri dari luas wilayah darat 108,265 Ha dan luas wilayah perairan/laut 318,298.28 Ha. Kota Batam meliputi lebih dari 400 (empat ratus) pulau, 329 (tiga ratus dua puluh Sembilan) di antaranya telah bernama, termasuk didalamnya pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan negara. Dalam hal ini Kota Batam berbatasan dengan: Sebelah Utara : Singapura dan Malaysia Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga Sebelah Barat : Kabupaten Karimun dan Laut Internasional 46 Sebelah Timur : Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang

- Sebelah Utara : Singapura dan Malaysia
- Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga
- Sebelah Barat : Kabupaten Karimun dan Laut Internasional

- Sebelah Timur : Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang.

Kota Batam secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu terletak di jalur pelayaran dunia internasional. Kota Batam berdasarkan perda nomor 2 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam 2004-2014, terletak antara $0^{\circ} 25' 29''$ - $1^{\circ} 15' 00''$ Lintang Utara $103^{\circ} 34' 35''$ - $104^{\circ} 26' 04''$ Bujur Timur

B. Kota Tanjung Pinang

Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kabupaten/kota pelaksana Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2013 di Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan Kota Batam. Pada tahun 1983, sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1983 Tanggal 18 Oktober 1983 telah dibentuk Kota Administratif Tanjungpinang yang terdiri atas 2 kecamatan yaitu kecamatan Tanjungpinang Timur dan kecamatan Tanjungpinang Barat. Dan kemudian seiring dengan perkembangan waktu, pada tahun 2001 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001, kota Administratif Tanjungpinang berubah menjadi Kota Tanjungpinang yang terdiri atas 4 kecamatan dan 18 kelurahan.

Secara geografis, Kota Tanjungpinang berada di Pulau Bintan dan wilayah Kota Tanjungpinang terletak pada titik koordinat antara $00^{\circ}51'$ - $00^{\circ}59'$ Lintang Utara dan $104^{\circ}23'$ - $104^{\circ}34'$ Bujur Timur, dengan total luas wilayah sebesar $239,50 \text{ KM}^2$.

Secara geologis, keadaan wilayah Kota Tanjungpinang sebagian besar terdiri dari daerah berbukit-bukit dengan lembah yang landai dan daerah pesisir laut serta beberapa pulau. Luas wilayah Kota Tanjungpinang mencapai 131,54 KM² luas daratan dan 107,96 KM² luas lautan. Secara administrasi wilayah Kota Tanjungpinang berbatasan langsung dengan wilayah administrasi Kabupaten Bintan dan Kota Batam, yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Bintan dan Kota Batam
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bintan
- Sebelah Barat : Kota Batam
- Sebelah Timur : Kabupaten Bintan

C. Kabupaten Bintan

Secara geografis, wilayah Kabupaten Bintan terletak antara 0°06'17" - 1° 34'52" Lintang Utara dan 104°12'47" Bujur Timur di sebelah Barat - 108° 02'27" Bujur Timur di sebelah Timur. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bintan adalah 87.717,84 km² terdiri atas wilayah daratan seluas 1.319,51 km² (1,50%) dan wilayah laut seluas 86.398,33 km² (98,50%). 2.1.1.2 Batas Administrasi Secara administrasi kewilayahan, Kabupaten Bintan berbatasan dengan daerah-daerah lain sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Anambas
- Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga

- Sebelah Barat : Kota Batam dan Kota Tanjungpinang
- Sebelah Timur : Provinsi Kalimantan Barat

D. Kabupaten Natuna

Kabupaten Natuna memiliki luas wilayah 264.198,37 km² dengan luas daratan 2.001,30 km² dan lautan 262.197,07 km². Ranai sebagai Ibukota Kabupaten Natuna. Di kabupaten ini terdapat 154 pulau, dengan 27 pulau (17,53 persen) yang berpenghuni dan sebagian besar pulau (127 buah) tidak berpenghuni. Dua pulau terbesar diantaranya adalah Pulau Bunguran dan Pulau Serasan.

Secara astronomis, Kabupaten Natuna terletak pada titik koordinat 1016'-7019' LU (Lintang Utara) dan 105000'-110000' BT (Bujur Timur). Batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan Laut Cina Selatan,
- Sebelah selatan dengan Kabupaten Bintan,
- Sebelah barat dengan Semenanjung Malaysia,
- Sebelah timur dengan Laut Cina Selatan.

E. Kabupaten Lingga

Kabupaten Lingga yang beribukota di Daik lingga dibentuk menjadi sebuah kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan UU RI seperti tersebut di atas, wilayah Kabupaten Lingga mempunyai luas wilayah daratan dan lautan mencapai 211.772 km² dengan luas daratan 2.117,72 km² (1 %) dan lautan 209.654 Km² (99%), dengan jumlah pulau 531 buah pulau besar dan kecil, serta 447 buah pulau diantaranya belum berpenghuni. Namun, berdasarkan data eksisting luas wilayah Kabupaten Lingga sebesar 45.508,66 Km² yang terdiri dari luas daratan sebesar 2.235,51 Km² (4,91%), dan lautan sebesar 43.273,15 Km² (95,09%).

F. Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun terletak pada koordinat 00°24'36" LU sampai 01°13'12" LU dan 103°13'12" BT sampai 104°00'36" BT dengan wilayah laut yang berada dalam batas wilayah empat mil yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang- Undang Nomor 5 tahun 1983.

Kabupaten Karimun termasuk ke dalam wilayah yang sangat strategis untuk pengembangan kegiatan ekonomi. Letaknya berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura, serta hanya disatukan dengan perairan Selat Singapura (*Phillip channel*). Selain itu, wilayah administrasi Kabupaten Karimun berbatasan dengan Kota Batam, sebagian Kepulauan Riau dan sebagian wilayah

Provinsi Riau. Berdasarkan aspek geostrategisnya, maka Kabupaten Karimun menjadi salah satu dari empat kabupaten yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB atau *Free Trade Zone/FTZ*). Tiga kawasan KPBPB lainnya adalah Sabang, Bintan, dan Batam. Batas-batas Kabupaten Karimun, yaitu:

- Utara : Selat Singapura (*Philip Channel*), Selat Malaka dan Semenanjung Malaysia.
- Selatan : Kecamatan Kateman (Kabupaten Indragiri Hilir) dan Kabupaten Lingga.
- Barat : Kecamatan Tebing Tinggi (Kabupaten Bengkalis) dan Kecamatan Kuala Kampar (Kabupaten Pelalawan).
- Timur : Kecamatan Belakang Padang (Kota Batam)

G. Kabupaten Anambas

Kabupaten Kepulauan Anambas, Terletak antara 2°10'0"-3°40'0"LU s/d 105°15'0"- 106°45'0" BT (UU No 33 Tahun 2008), Sebagai Kabupaten yang terletak di beranda depan wilayah Indonesia, Kabupaten Kepulauan Anambas berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga lainnya yaitu :

- Sebelah utara dengan Laut Cina Selatan/ Vietnam.
- Sebelah selatan dengan Kepulauan Tambelan.
- Sebelah barat dengan Lautan Cina Selatan/Malaysia.
- Sebelah timur dengan Laut Natuna.

3.1.4 Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:2) metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yaitu dengan metode penelitian kuantitatif.

Definisi metode penelitian kuantitatif menurut Sugiono (2015:14) yaitu :

“ Metode penelitian Kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Selanjutnya, didalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif.

Definisi pendekatan deskriptif menurut Nazir (2011:54) yaitu :

“ Suatu metode dalam memiliki suatu sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun studi kelas peristiwa pada masa sekarang. Metode deskriptif ini digunakan untuk menjawab seluruh variabel penelitian secara independen”.

Dalam penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui bagaimana analisis faktor-faktor yang mempengaruhi belanja infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau.

Definisi pendekatan verifikatif menurut Nazir (2011:105) adalah :

“ Metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas antara variabel melalui suatu pengujian hipotesis melalui suatu perhitungan statistic sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima”.

Dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian verifikatif sebagai syarat yang dibutuhkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi belanja infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau yang didapat dari hasil pembuktian yang menunjukkan diterima atau ditolak.

3.2 Variabel dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

3.2.1 Definisi Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*) (X)

Menurut Sugiyono (2015:39) definisi variabel independen (variabel bebas) adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya Variabel Bebas (*Independent Variable*) yang diteliti, yaitu :

a. Pendapatan Asli Daerah (X1)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengertian pendapatan asli daerah yang dikemukakan oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan sumber penerimaan asli daerah yang digali didaerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar penerimaan daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketegantungan dana dari pemerintah pusat.

Pengukuran variabel PAD ini diukur dengan skala rasio. PAD dapat diukur dengan perhitungan :

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{PLPD} + \text{LPS}$$

b. Dana Alokasi Umum (X2)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengertian Dana Alokasi Umum yang dikemukakan oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yaitu Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Variabel DAU ini diukur dengan menggunakan skala rasio. DAU dapat ditentukan dengan perhitungan :

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

c. Dana Alokasi Khusus (X3)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengertian dana alokasi khusus yang dikemukakan menurut PP Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 yaitu Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan

prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk masing-masing pemerintah provinsi dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

- Perhitungan alokasi DAK dilakukan 2 (dua) tahapan, yaitu :

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK

Menentukan daerah penerima dengan menggunakan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Daerah dengan kriteria umum (KU) dibawah rata-rata kriteria umum (KU) secara Nasional adalah daerah yang prioritas mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK).

- a. Kriteria Umum (KU)

Dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin ddari penerimaan umum APBD setelah dikurang belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.

$$\text{KU} = (\text{PAD} + \text{DAU} + \text{DBH} - \text{DBRDR}) - \text{Belanja Gaji PNSD}$$

Keterangan :

Kemampuan Keuangan Daerah = Penerimaan Umum

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DBH = Dana Bagi Hasil

DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

PNSD = Pegawai Negeri Sipil Daerah

b. Kriteria Khusus (KK)

1. Kriteria Khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus dan karakteristik daerah. Untuk perhitungan alokasi DAK, kriteria khusus yang digunakan yaitu :

1. Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus (Papua & Papua Barat), dan karakteristik daerah, yang meliputi :
 - 1) Daerah Tertinggal
 - 2) Daerah perbatasan dengan negara lain
 - 3) Daerah rawan bencana
 - 4) Daerah Pesisir dan/ atau kepulauan
 - 5) Daerah ketahanan pangan
 - 6) Daerah pariwisata
2. Seluruh daerah tertinggal diprioritaskan mendapatkan alokasi DAK

c. Kriteria Teknis (KT)

Ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga teknis terkait yang memuat indikator-indikator yang mencerminkan kebutuhan teknis.

1. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah mengitung Dana Alokasi Khusus (DAK) per daerah dengan menggunakan indeks dari kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*) (Y)

Menurut Sugiyono (2015) variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini terdapat satu Variabel Terikat (*Dependent Variable*) yang diteliti yaitu :

a. Belanja Infrastruktur

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan definisi belanja infrastruktur menurut PP No. 71 Tahun 2010 yaitu belanja infrastruktur atau belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah

belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Pengukuran variabel belanja infrastruktur atau belanja modal menurut PP No. 71 Tahun 2010 ini diukur dengan skala rasio. Belanja Infrastruktur dapat diukur dengan perhitungan :

Belanja Infrastruktur = Belanja Tanah + Belanja Peralatan & Mesin + Belanja Gedung & Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan + Belanja Aset Lainnya

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah Pengertian Belanja menurut PSAP No.2, (dalam Erlina, 2008) adalah “Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang, “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan

fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas.

3.2.2 Operasional Variabel Penelitian

Operasional variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Operasionalisasi variabel dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
1. Pendapatan Asli Daerah (X1)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004)	Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan + lain-lain pendapatan yang sah. (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004)	Rasio
2. Dana Alokasi Umum (X2)	Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Undang-Undang No. 33	Celah Fiskal + Alokasi Dasar Dimana, celah fiskal = Kebutuhan Fiskal- Kapasitas Fiskal Dana yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintahan	Rasio

	Tahun 2004)	daerah yang bersumber dari pendapatan APBN. (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004)	
3. Dana Alokasi Khusus (X3)	<p>Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.</p> <p>(PP Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005)</p>	<p>Perhitungan alokasi DAK dilakukan 2 (dua) tahapan yaitu:</p> <p>(1) .Penentuan Daerah tertentu yang menerima DAK.</p> <p>a. Kriteria Umum (KU)</p> <p>b. Kriteria Khusus (KK)</p> <p>c. Kriteria Teknis (KT)</p> <p>(2). Penentuan Daerah tertentu yang menerima DAK.</p> <p>(PP Republik Indonesia No.55 Tahun 2005)</p>	Rasio
4. Belanja Infrastruktur (Y)	<p>Belanja Infrastruktur atau Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah atau selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti</p>	<p>Belanja Tanah + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya (PP No. 71 Tahun 2010)</p>	Rasio

	biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. (PP No. 71 Tahun 2010)		
--	--	--	--

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:80) mendefinisikan populasi sebagai berikut :

“ Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Berikut adalah nama Kota/ Kabupaten Provinsi Kepulauan Riau yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, yaitu :

Tabel 3.2 Sampel Penelitian

No	Nama Kota/ Kabupaten
	Kota
1	Kota Batam
2	Kota Tanjung Pinang
	Kabupaten
3	Kabupaten Lingga

4	Kabupaten Natuna
5	Kabupaten Bintan
6	Kabupaten Anambas
7	Kabupaten Karimun

3.3.2 Sampel Penelitian dan Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2016:81) definisi sampel sebagai berikut :

“ Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dan melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistic atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus *representatif* (mewakili)”.

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan penulis yaitu menggunakan *Non probability Sampling* dengan menggunakan sampling jenuh.

Menurut Sugiyono (2016:82) definisi *Non Probability Sampling* adalah :

“ *Non Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih

menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, sampling sistematis, kuota, aksidental, *purposive*, jenuh, *snowball*".

Menurut Sugiyono (2016:82) definisi sampling jenuh adalah :

“ Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel”.

3.4 Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data Panel

3.4.1 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2014:3) sumber data adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekundernya yaitu berupa dokumen laporan Realisasi APBD yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan data tersebut diperoleh melalui internet yaitu <http://www.kepriprov.go.id>. Hasil yang diperoleh dari laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran pendapatan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus di Provinsi Kepulauan Riau.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap besaran

variabel yang diwakilinya. Data kuantitatif tersebut diperoleh langsung melalui website yaitu <http://www.kepriprov.go.id>.

Adapun cara untuk memperoleh data dari informasi dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut :

1. Riset Internet (*online research*)

Pengumpulan data observasi dengan data sekunder berupa Laporan Realisasi APBD yang telah diaudit oleh Badan Keuangan dan data tersebut diperoleh langsung melalui website <http://www.kepriprov.go.id>. Provinsi kepulauan riau.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dimaksud sebagai cara mendapatkan landasan teoritis yang dapat dijadikan pedoman dalam mendapatkan teori yang didapat dengan praktik di lapangan, yaitu membaca literature yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, membaca buku-buku dan artikel-artikel dengan masalah yang diteliti

3.4.3 Model Analisis Data Panel

Analisis regresi data panel merupakan gabungan antara data *cross section* dan data *time series*, dimana unit *cross section* yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu

yang sama diamati dalam kurun waktu tertentu. Metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain

a. *Common Effect*

Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi parameter model data panel, yaitu dengan mengkombinasikan data *cross section* dan *time series* sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan entitas (individu). Model *Common Effect* mengabaikan adanya perbedaan dimensi individu maupun waktu atau dengan kata lain perilaku data antar individu sama dalam berbagai kurun waktu.

b. *Fixed Effect Model*

Pada pendekatan *Fixed Effect* ini merupakan teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan *intercep*.

c. *Random Effect Model*

Mengestimasi data panel dengan *fixed effects* melalui teknik variabel dummy menunjukkan ketidak pastian model yang kita gunakan. Untuk mengatasi masalah ini kita bisa menggunakan variabel residual dikenal sebagai metode *random effect*.

Model ini akan memilih estimasi data panel dimana residual mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu.

3.5 Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda, Analisis regresi ini digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y), dimana dari persamaan tersebut dapat diketahui besarnya kontribusi variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Penelitian ini terdiri dari 4 variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) dan 1 variabel dependen (Belanja Infrastruktur), sehingga menggunakan persamaan regresi berganda. Oleh karena itu, maka penulis memakai model penelitian sebagai berikut :

3.5.1 Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan metode regresi data panel atau *Panel Pooled Data*. Model regresinya dapat ditulis sebagai berikut : Untuk melakukan analisis dalam penelitian data panel ini, maka digunakan fungsi atau model sebagai berikut.

$$Y = f(X_1, X_2, X_3)$$

Dengan demikian dari fungsi persamaan diatas dapat dituliskan model regresi data panel atau estimasi model data panel adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_{0it} + \beta_{1it}X_{1it} + \beta_{2it}X_{2it} + \beta_{3it}X_{3it} + e.$$

Keterangan :

Y = Belanja Infratraktur

X1 = Pendapatan Asli Daerah

X2 = Dana Alokasi Umum

X3 = Dana Alokasi Khusus

β_0 = Konstanta regresi

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

i = *cross section*

t = *time series*

e = Kesalahan pengganggu

3.6 Uji Metode Estimasi Data Panel

Sebelum menentukan metode estimasi data panel yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka harus dilakukan beberapa pengujian. Untuk menentukan apakah model panel data dapat diregresi dengan metode *Pooled Least Square (PLS)*, metode *Fixed Effect (FE)* atau metode *Random Effect (RE)*, maka dilakukan uji-uji sebagai berikut:

1. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara metode pendekatan *Fixed Effect (FE)* atau metode *Random Effect (RE)*. Prosedur Uji Hausman adalah sebagai berikut:

- a. Buat Hipotesis dari uji Hausman:

- $H_0 = \text{random effect.}$
 - $H_1 = \text{fixed effect.}$
- b. Menentukan kriteria uji:
- Apabila *Chi-square* hitung $>$ *Chi-square* tabel dan *p-value* signifikan, maka hipotesis H_0 ditolak, sehingga metode *fixed effect* lebih tepat untuk digunakan.

Apabila *Chi-square* hitung $<$ *Chi-square* tabel dan *p-value* signifikan, maka hipotesis H_0 diterima, sehingga metode *random effect* lebih tepat untuk digunakan.

3.7 Uji Statistik

Selain uji asumsi klasik, dilakukan uji statistik untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktualnya. Uji statistik dilakukan dengan koefisien determinasi (R^2), pengujian koefisien regresi secara individual (uji t) dan pengujian koefisien regresi secara serentak (uji F).

3.7.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) menyatakan besarnya variasi dari variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variasi-variasi variabel bebas yang ada di dalam model. Besarnya nilai koefisien determinasi adalah antara 0 hingga 1 ($0 < R^2 < 1$), dimana nilai koefisien mendekati 1, maka model tersebut dikatakan baik karena

variasi variabel terikat semakin dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebasnya (Gujarati, 2007).

3.7.2 Uji parsial (t-stat)

Uji t-statistik digunakan untuk menguji pengaruh parsial dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya, uji t-stat dilakukan untuk menguji hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \alpha_i = 0$, variabel bebas secara parsial signifikan tidak mempengaruhi variabel terikat.

$H_1 : \alpha_i \neq 0$, variabel bebas secara parsial signifikan mempengaruhi variabel terikat.

- Kriteria Uji

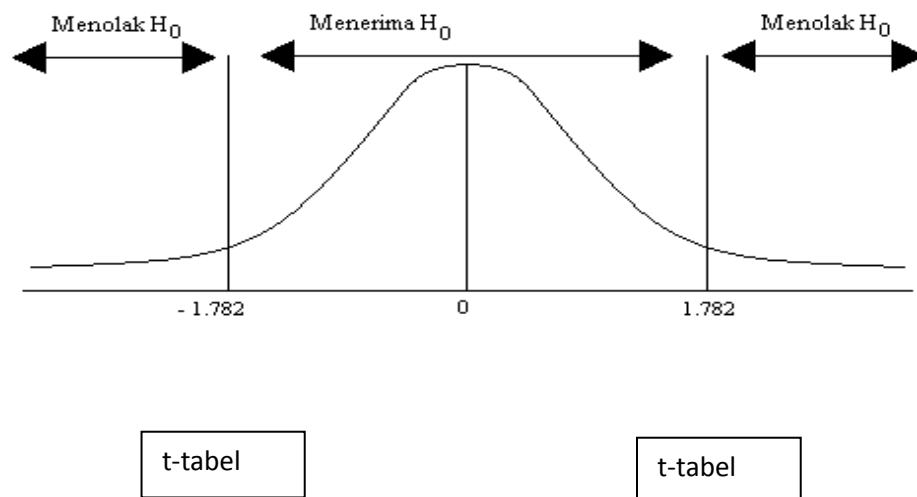
- Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya ada pengaruh signifikan dari variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.
- Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.

Dengan menguji dua arah dalam signifikansi $\frac{1}{2} \alpha$, dan derajat kebebasan (*degree of freedom*, df) = $n-k$ dimana ; n = jumlah observasi dan ; k = jumlah parameter termasuk konstanta, maka hasil pengujian akan menunjukkan:

H_0 diterima bila $t\text{-stat} < t\text{-tabel}$

H_1 diterima bila $t\text{-stat} > t\text{-tabel}$

Uji t dua arah digunakan apabila peneliti tidak memiliki informasi mengenai kecenderungan dari karakteristik populasi yang sedang diamati.



Gambar 3.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 (t-tabel)

3.7.3 Uji Simultan (F-stat)

Pengujian ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh dari semua variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel tidak bebasnya/terikat, (Gujarati, 2008). Uji F dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

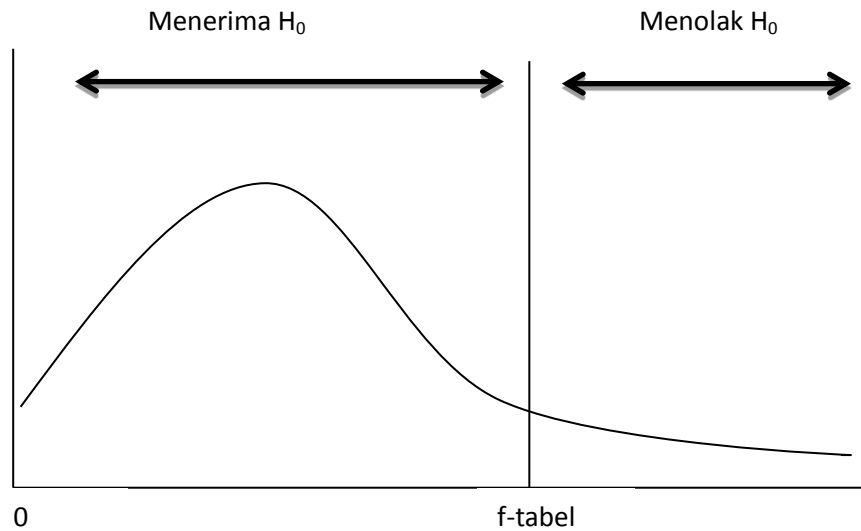
$H_0 : \alpha_1 \dots, \alpha_n = 0$, artinya tidak ada pengaruh yang nyata antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

$H_1 : \alpha_1 \dots, \alpha_n \neq 0$, artinya terdapat pengaruh yang nyata dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Mencari F-tabel dari tabel distribusi F, nilai F-tabel berdasarkan besarnya tingkat keyakinan (α) dan df ditentukan oleh *numerator* (k-1), df untuk *denominator* (n-k).

Hasil pengujian akan menunjukkan:

- a. Apabila nilai F-hitung \geq F-tabel, maka H_0 ditolak. Artinya, setiap variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel tidak bebasnya/terikat.
- b. Apabila nilai F-hitung \leq F-tabel, maka H_0 diterima. Artinya, variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel tidak bebasnya/terikat.



Gambar 3.3 Kriteria Uji F

3.8 Uji Asumsi Klasik

3.8.1 Uji Heteroskedastis

Uji heteroskedastis merupakan salah satu asumsi klasik yang harus dipenuhi oleh penaksir OLS. Penyimpangan terhadap asumsi homokedastis tersebut disebut sebagai heteroskedastis. Homoskedastis dapat terjadi bila distribusi suatu probabilitas tetap sama dalam semua observasi X , dan varian setiap residual adalah sama untuk semua nilai variabel penjelas. Guna mengetahui heteroskedastis dilakukan dengan menggunakan *Uji White*.

Hipotesis nol dalam uji adalah tidak ada heteroskedastisitas. *Uji White* didasarkan pada jumlah sampel (n) dikalikan dengan R^2 yang akan mengikuti distribusi *chi-squares* dengan df sebanyak variabel independen yang tidak termasuk

konstanta dengan regresi *auxiliary*. Nilai hitung statistik *chi-squares* (χ^2) dapat dicari dengan formula sebagai berikut:

$$n R^2 = \chi^2 \text{ df}$$

jika nilai *chi-squares* hitung ($n R^2$) lebih besar dari nilai χ^2 kritis dengan derajat kepercayaan tertentu (α), maka ada heteroskedastisitas dan sebaiknya jika *chi-squares* hitung lebih kecil dari nilai χ^2 kritis, maka tidak ada heteroskedastisitas (Widarjono, 2009).

3.8.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas itu diperkenalkan oleh Ragnar Frisch tahun 1934. Menurutnya, suatu model regresi dikatakan terkena multikolinearitas bila terjadi hubungan linear yang sempurna diantara beberapa variabel bebas dari suatu model regresi. Akibatnya, akan terdapat kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

Multikolinearitas dapat dideteksi salah satunya apabila nilai R^2 tinggi, tetapi tidak ada atau hanya sedikit variabel independen yang secara tunggal berpengaruh terhadap variabel dependen berdasarkan uji t-stat. Salah satu cara untuk mengetahui variabel independen mana yang berhubungan dengan variabel independen lainnya adalah dengan “*Deteksi klien*” (Widarjono, 2009), yaitu dengan melakukan regresi atas satu variabel independen terhadap variabel independen lainnya, dan menghitung nilai R^2 -nya. Apabila nilai R^2 hasil regresi tersebut lebih kecil dari nilai R^2 hasil perhitungan regresi output terhadap variabel input secara keseluruhan, maka dalam

model tersebut tidak terdapat masalah multikolinieritas. Selain itu, ada atau tidaknya multikolinieritas dapat diketahui atau dilihat dari koefisien korelasi masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0.8, maka terjadi masalah multikolinieritas.